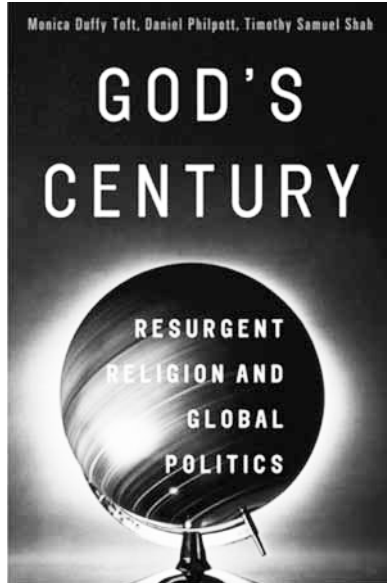


Resensi



MENYAMBUT ERA KEBANGKITAN AGAMA

Judul Buku	: God's Century: Resurgent Religion and Global Politics
Pengarang	: Monica Duffy Toft, Daniel Philpott, dan Timothy Samuel Shah
Penerbit	: W.W. Norton & Company, Inc., 2009.
Tahun	: 2009
Tebal Halaman	:

Mohammad Iqbal Ahnaf

Peran agama dalam kehidupan politik, baik di tingkat nasional atau internasional nampaknya semakin tak terbantahkan. Buku ini menyajikan argumen dan fakta yang menunjukkan transformasi ini. Klaim ini sebenarnya bukanlah hal baru. Sebelumnya tidak sedikit karya ilmiah yang menunjukkan apa yang disebut dengan gejala era kebangkitan agama (*the resurgence of religion*). Revisi terhadap teori sekularisasi yang datang dari salah satu pendukung utama teori, yaitu Peter L. Berger. Pada tahun 1998 ia mengeluarkan buku berjudul *The Desecularization of the World: A Global Overview* (1999) yang dimaksudkan untuk merevisi teori dia sebelumnya bahwa seiring modernisasi agama akan semakin kehilangan relevansi. Keyakinan terhadap Tuhan akan digeser oleh rasio yang dapat menjelaskan banyak hal yang selama ini dipahami melalui narasi keagamaan.

Berger dalam buku ini menegaskan era kebangkitan agama justru didorong oleh dua faktor yang sama yang sebelumnya menjadi dasar teori sekularisasi, yaitu demokratisasi

atau kebebasan politik dan kemajuan teknologi informasi. Di banyak tempat demokrasi bukannya meminggirkan politik agama, tetapi justru sebaliknya membuka ruang bagi munculnya partai dan gerakan politik berbasis agama seperti kebangkitan nasionalisme Hindu di India, kemenangan politik Islam di Turki, dan menguatnya kekuatan Kristen sayap kanan (*Christian Religious Right*) di Amerika Serikat (halaman 7). Patut dicatat tumbanganya beberapa rezim di negara-negara Arab yang dapat dikenal dengan istilah *Arab Spring* (musim semi di Arab) tidaklah lepas dari kekuatan beragam gerakan sosial dan politik berbasis keagamaan.

Yang patut digarisbawahi dari buku *God's Century* ini adalah argumen bahwa kebangkitan peran agama tidak hanya terbatas pada kehidupan individual, tetapi juga kehidupan publik. Argumen ini memperkuat beberapa karya akademik sebelumnya seperti publikasi dari hasil survei Jonathan L. Fox berjudul *A World Survey of Religion and the State* (Cambridge

University Press, 2007). Hasil survei Fox menunjukkan lebih dari 50 persen negara-negara di dunia memiliki regulasi yang membatasi peran agama dalam kehidupan politik. Meskipun desakan peran agama dalam kehidupan politik, baik secara negatif dan positif, nampaknya sulit dibendung. Desakan peran agama dalam kehidupan publik ini digambarkan dengan sangat baik oleh para penulis dalam kalimat berikut:

"Once private, religion has gone public. Once passive, religion is now assertive and engaged. Once local, it is now global. Once subservient to the powers that be, religion has often become 'prophetic' and resistant to politicians at every level" (halaman 184).

Apa yang mendorong era kebangkitan politik agama atau *religion's political comeback*, dalam istilah para penulis? Menjawab pertanyaan ini, para penulis menawarkan dua penjelasan. Yang pertama adalah menguatkannya teologi politik, yakni keyakinan bahwa komunitas keagamaan bertanggungjawab terhadap otoritas politik untuk menegakkan keadilan. Keyakinan demikian membeirkan dorongan yang kuat untuk menghadirkan nilai, moral dan bahkan hukum agama dalam kehidupan politik ketatanegaraan. Kecenderungan ini tidak hanya muncul dalam agama-agama yang selama ini terkait erat dengan kehidupan politik seperti Islam. Agama Buddha yang selama ini lebih menonjolkan spritualitas individual berkait erat dengan kehidupan politik seperti di Sri Lanka dan Thailand.

Faktor yang kedua adalah adanya hubungan saling membutuhkan antara otoritas politik dan otoritas keagamaan. Dari sisi aktor politik hubungan baik dengan aktor-aktor keagamaan diperlukan untuk memperkuat basis dukungan politik secara elektoral. Fakta bahwa sebagian besar penduduk di negara-negara demokrasi seperti Indonesia adalah pemeluk agama yang taat mejadikan sentimen keagamaan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam mobilisasi politik. Dari sisi aktor keagamaan, para penulis buku ini menekankan pada menguatkannya teologi politik yang mendorong

aktor keagamaan mendekati otoritas politik. Kedekatan atau kemampuan untuk mempengaruhi aktor politik dimaksudkan untuk memperkuat peran agama dalam kehidupan publik. Poin ini meskipun tidak salah patut dikritik karena tidak menjelaskan realitas hubungan saling membutuhkan antara otoritas politik dan otoritas keagamaan. Upaya aktor-aktor keagamaan untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor politik tidak selalu didorong oleh teologi politik. Di Indonesia sejumlah organisasi keagamaan yang secara teologis cenderung a-politis seperti Jemaah Tabligh, gerakan Salafi, dan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) dikenal mempunyai kedekatan dengan birokrasi pemerintahan. Kedekatan mereka dengan aktor-aktor politik lebih dapat dijelaskan sebagai manifestasi kepentingan keamanan atau mobilisasi pengaruh sosial-teologis daripada usaha untuk memformalkan nilai keagamaan dalam kehidupan ketatanegaraan.

Bagi para penulis kebangkitan peran agama dalam kehidupan politik tidak perlu dilihat sebagai ancaman. Hal ini karena dalam banyak kasus menguatkannya peran agama dalam kehidupan politik juga diiringi oleh kecenderungan moderasi di kalangan gerakan politik agama. Dalam konteks gerakan Islam kecenderungan ini digambarkan dengan baik dalam istilah *post-Islamisme* yang dipopulerkan oleh Asef Bayat dalam bukunya *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn* (Stanford University Press, 2007). Meski kekuatan-kekuatan totalitarian masih mewarnai politik negara-negara Muslim yang demokratis, gerakan-gerakan politik Islam masa kini pada umumnya cenderung lebih terbuka dan menerima sistem politik demokrasi.

Buku ini ditutup dengan sepuluh langkah yang ditawarkan penulis untuk menghadapi era kebangkitan agama. Di antaranya para penulis menyarankan agar peran agama dalam kehidupan politik tidak diremehkan sekaligus tidak dilebih-lebihkan. Tidak diremehkan dalam pengertian mengesampingkan kekuatan

aktor keagamaan dalam program-program pembangunan; dan tidak melebih-lebihkan dalam pengertian tidak mensakralkan peran agama sehingga sepenuhnya membawa agama dalam kancah politik atau sebaliknya berusaha menekan atau meminggirkan peran agama dalam kehidupan publik yang

berpotensi menciptakan kemarahan aktor-aktor keagamaan; hal ini pada ujungnya dapat menghasilkan situasi yang mendukung ekstrimisme.

Era kebangkitan agama yang terus bergulir, buku ini layak dibaca oleh semua kalangan, termasuk politisi, pembuat hukum, pemerintahan, gerakan sosial, pelaku pembangunan, dan bahkan pebisnis.